

Guba. Antara lain : Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, dll.³⁹ Dalam Penelitian ini penulis melakukan wawancara ke beberapa bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi yaitu Kepala Bidang Pelatihan dan produktivitas kerja, Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Peluasan Kerja dan Sub.Bagian program.

c. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan melakukan *Searching* di dunia Internet, dan beberapa referensi buku yang berkaitan dengan data penelitian ini yang kami cantumkan dalam catatan kaki ataupun pada daftar pustaka.

5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka penulis akan menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul yang di peroleh dari responden atau sample di lapangan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis data dan kemudian disusun secara logis untuk menjawab permasalahan.

³⁹ Dr.Lexy J. Moleong, M.A, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, (hal 135)

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

1. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah Kabupaten Bantul yaitu: "BANTUL PROJOTAMANSARI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif professional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Professional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

Ijo Royo-Royo dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang diterlantarkan sehingga baik di musim hujan baik musim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sector industry yang kuat di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga Negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata riang di desa dan di kota dapat serasi, serlaras, dan seimbang dengan kegiatan - kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menimbulkan

perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama – sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai – nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai – nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi social sehari – hari.

b. Misi

- 1) Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan drajat kesejahteraan masyarakat yang didasarkan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.

- 3) Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supermasi hukum.
- 4) Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Data Desa Wisata Di Kabupaten Bantul Beserta Potensinya

Tabel 2.1
Data Desa Wisata Di Kabupaten Bantul Beserta Potensinya

No	Nama Desa Wisata	Potensi Desa
1.	Kebon Agung	Wisata pendidikan pertanian
2.	Krebet	Kerajinan batik kayu & Jurang Pulosari
3.	Wukirsari	Batik tulis pewarna alami
4.	Tembi	Aneka kerajinan
5.	Kasongan	Sentra kerajinan gerabah
6.	Karang tengah	Budidaya ulat sutera & batik pewarna alami
7.	Manding	Sentra kerajinan kulit
8.	Puton	Alam dan perikanan
9.	Jagalan	Cagar budaya
10.	Candran	Museum tani
11.	Lopati	Kuliner
12.	Kalibuntung	Wisata pedesaan
13.	Parangtritis	Alam dan kuliner
14.	Kuwaru	Alam dan kuliner
15.	Goa Cemara	Alam dan kuliner
16.	Guwosari	Cagar budaya & kerajinan kayu
17.	Panjangrejo	Kerajinan gerabah
18.	Trimulyo	Alam pedesaan & batik "sekar nitik"
19.	Canden	Jamu herbal
20.	Tirtosari	Kuliner
21.	Seloharjo	Seni budaya
22.	Imogiri	Wisata budaya
23.	Srunggo	Alam karet
24.	Pantai Baru	Wisata Alam Pendidikan
25.	Cangkring	Wisata alam
26.	Gilangharjo	Alam & Pendidikan
27.	Wunut, Sriharjo	Alam Budaya dan Kerajinan
28.	Santan, Guwosari	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantul.

3. Bentuk dan Lambang Daerah

Gambar 2.1
Lambang Kabupaten Bantul



Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dan dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL”. Di dalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan Keadaan Alam, Kekayaan Alam, Latar Belakang Sejarah, Semangat dan Cita – cita, Persatuan/kesatuan, Ukuran Lambang Daerah pada garis Horisontal 30 dan garis tengah Vertikal 40. Arti dan makna lambing daerah :

a. Landasan Idiil Pancasila

b. Cita – cita Distrik Bantul berpedoman lima motto Kabupaten Bantul

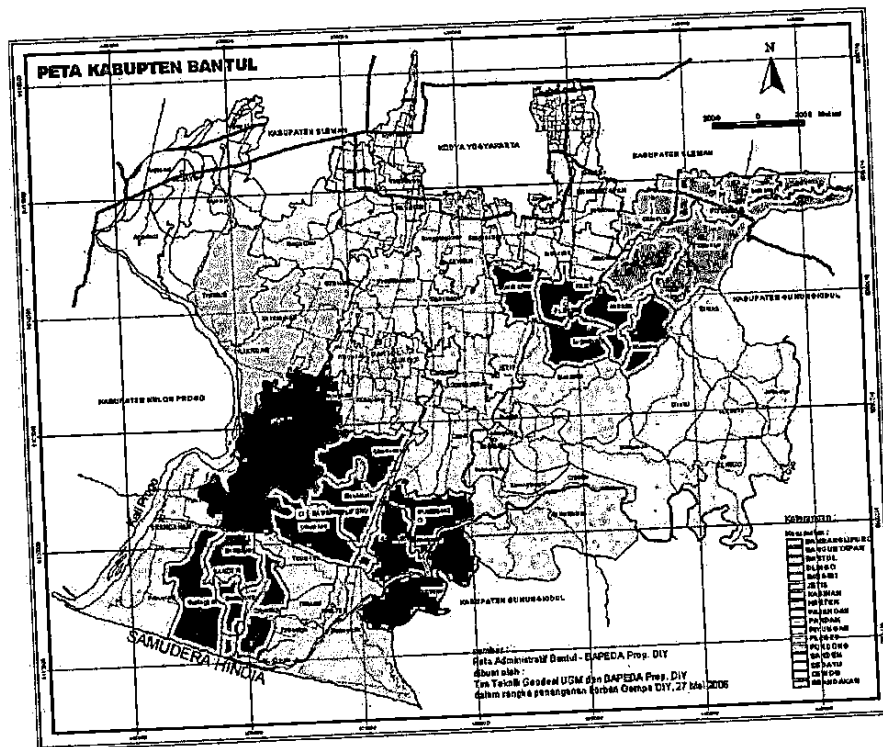
- c. Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d. Lukisan Dalam Warna Merah, Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- e. Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- f. Lukisan Dalam Gambar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- g. Landasan Struktur Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi (linggir Jawa) Emoat dan Keris Bertekuk (luk Jawa) Lima.
- h. Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi "HAMAMAYU HAYUNING BAWONO". Nilai - nilai keagamaan dilukiskan dalam gambar bintang emas bersegi lima.
- i. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu penjajah Belanda.
- j. Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri.

4. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai lima kabupaten dan satu Kotamadya, Kabupaten Bantul merupakan Salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten yang terdapat pada provinsi DIY. Apabila terletak bentang alamnya, wilayah kabupaten bantul terdiri dari daerah daratan yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai terletak di bagian selatan. Kondisi bentang alam tersebut relative membujur dari utara ke selatan. Secara Geografis Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Dari sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dari sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dari sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan dari sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.¹

¹ http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html Juli 05, 2014

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Bantul



5. Kondisi Demografi Kabupaten Bantul

a. Kependudukan

Kepadatan penduduk dapat dilihat berdasarkan beberapa sudut pandang yaitu Kepadatan penduduk geografis, Kepadatan penduduk agraris, Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan lain sebagainya.

Table 2.2
Kepadatan Penduduk Geografis Per Kecamatan
di Kabupaten Bantul Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan / Km ²
1.	Srandakan	18,32	28.582	1.560
2.	Sanden	23,16	29.636	1.280
3.	Kretek	27,77	29.135	1.088
4.	Pundong	23,68	31.603	1.335
5.	Bambanglipuro	22,7	37.480	1.651
6.	Pandak	24,3	47.908	1.972
7.	Bantul	21,95	59.754	2.722
8.	Jetis	24,47	52.313	2.138
9.	Imogiri	54,49	56.536	1.038
10.	Dlingo	55,87	35.667	638
11.	Pleret	22,97	43.185	1.880
12.	Piyungan	32,54	48.646	1.495
13.	Banguntapan	28,48	122.510	4.302
14.	Sewon	27,16	105.701	3.892
15.	Kasih	32,38	112.708	3.481
16.	Pajangan	33,25	44.7698	1.304
17.	Sedayu	34,36	44.798	1.293
	Jumlah	506,85	921.263	1.818

Sumber: BPS Kabupaten Bantul tahun 2012

Pada table 2.1. diketahui bahwa jumlah kepadatan Geografis tertinggi terdapat pada Kecamatan Banguntapan yaitu dengan kepadatan 4.302 km², sedangkan jumlah kepadatan Geografis terendah terdapat pada Kecamatan Dlingo 638 Km²

Table 2.3
Kepadatan Penduduk Agraris Per Kecamatan
di Kabupaten Bantul Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Areal Pertanian(Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan / Ha
1.	Srandakan	419	28.668	50
2.	Sanden	986	29.744	26
3.	Kretek	892	29.323	12
4.	Pundong	864	31.779	24
5.	Bambanglipuro	1.164	37.480	24
6.	Pandak	927	47.908	28
7.	Bantul	1.132	59.754	58
8.	Jetis	1.177	52.313	39
9.	Imogiri	1.109	56.	51
10.	Dlingo	512	35.667	9
11.	Pleret	860	43.731	26
12.	Piyungan	1.385	49.427	23
13.	Banguntapan	1.409	122.510	100
14.	Sewon	1.305	105.701	83
15.	Kasih	673	112.708	150
16.	Pajangan	262	33.216	23
17.	Sedayu	960	44.798	16
Jumlah		16.036	921.263	31

Sumber: BPS Kabupaten Bantul tahun 2012

Berdasarkan table 2.2. Diketahui bahwa jumlah kepadatan penduduk agraris atau penggunaan lahan per hektar terbesar terdapat pada kecamatan Kasihan yaitu mencapai 150 per hektar dengan jumlah penduduk sekitar 112.708 orang, jika di bandingkan dengan Kecamatan Banguntapan yang kepadatan penggunaan lahan per hektar hanya mencapai 100 sedangkan penduduknya lebih tinggi dari Kecamatan Kasihan yaitu sebesar 122.510 orang. sedangkan untuk jumlah kepadatan penggunaan lahan per hektar terkecil terdapat pada kecamatan Dlingo yaitu hanya sekitar 9 per hektar dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu 35.667 orang.

Table 2.4
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.214	14.454	28.668
2.	Sanden	14.616	15.128	29.744
3.	Kretek	14.131	15.192	29.323
4.	Pundong	15.543	16.236	31.779
5.	Bambanglipuro	18.414	18.897	37.311
6.	Pandak	23.926	23.982	47.908
7.	Bantul	29.681	30.073	59.754
8.	Jetis	25.887	26.426	52.313
9.	Imogiri	28.008	28.528	56.536
10.	Dlingo	17.609	18.058	35.667
11.	Pleret	21.926	21.805	43.731
12.	Piyungan	24.604	24.823	49.427
13.	Banguntapan	62.127	60.383	122.510
14.	Sewon	53.486	52.215	105.701
15.	Kasih	56.487	56.221	112.708
16.	Pajangan	16.493	16.723	33.216
17.	Sedayu	22.197	22.601	44.798
	Jumlah	459.459	461.804	921.263
	Presentase	49,87	50,13	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul tahun 2012

Berdasarkan table 2.3 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bantul dengan kelamin Perempuan lebih banyak yaitu sebesar 50,13% sedangkan Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 49,87%. jika diperhatikan lebih lanjut jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kecamatan banguntapan yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 122.510 orang, sedangkan untuk jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Srandakan yaitu

Table 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kecamatan	Kelompok Umur						Jumlah
		0-9	10-14	15-19	20-24	25-39	40 tahun keatas	
1.	Srandakan	4.160	2.066	2.177	1.834	6.237	12.194	28.668
2.	Sanden	4.184	2.248	2.288	1.638	6.170	13.216	29.744
3.	Kretek	3.928	2.133	2.188	1.699	6.084	13.291	29.323
4.	Pundong	4.546	2.355	2.418	2.039	6.880	13.541	31.779
5.	Bambanglipuro	5.598	2.675	2.699	2.268	8.212	16.028	37.480
6.	Pandak	7.016	3.562	3.628	3.190	10.824	19.688	47.908
7.	Bantul	9.034	4.299	4.532	4.372	13.872	23.645	59.754
8.	Jetis	8.155	3.749	3.917	3.619	12.506	20.367	52.313
9.	Imogiri	8.613	4.034	4.163	3.908	13.395	22.423	56.536
10.	Dlingo	5.527	2.920	2.782	2.294	7.898	14.516	35.667
11.	Pleret	7.621	3.452	3.626	3.308	11.279	14.445	43.371
12.	Piyungan	8.153	4.324	4.155	3.459	11.960	17.376	49.427
13.	Banguntapan	20.062	8.844	9.626	12.724	32.430	38.824	122.510
14.	Sewon	16.341	7.768	8.510	10.009	27.150	35.923	105.701
15.	Kasih	17.573	8.318	9.108	11.476	28.809	37.424	112.708
16.	Pajangan	5.628	2.511	2.511	2.447	8.105	12.244	33.216
17.	Sedayu	7.151	3.400	3.400	3.078	10.554	17.254	44.798
	Jumlah	142.660	68.749	71.728	73.362	222.365	342.399	921.263

Sumber: BPS Kabupaten Bantul tahun 2012

6. Kondisi Topografi Kabupaten Bantul

Luas wilayah Kabupaten Bantul berkisar 508,85 Km² (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :²

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).

² http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html. Juli 05, 2014

- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %)
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%)
- d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata guna lahan pada kabupaten bantul yaitu :

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1) Perkarangan | : 18.327,15 Ha (36,16%) |
| 2) Sawah | : 16.823,84 Ha (33,19%) |
| 3) Tegalan | : 7.554,454 Ha (14,90) |
| 4) Tanah Hutan | : 1.697,80 Ha (3,35%) |

Kabupaten bantul dialiri oleh enam sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². Adapun ke enam sungai tersebut antara lain :

- | | |
|-------------------|------------|
| 1) Sungai Oyo | : 35,75 Km |
| 2) Sungai Opak | : 19,00 Km |
| 3) Sungai Code | : 7,00 Km |
| 4) Sungai Winongo | : 18,75 Km |
| 5) Sungai Bedok | : 9,50 Km |
| 6) Sungai Progo | : 24,00 Km |

Table 2.6
Jumlah Desa, Dusun dan Luas kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km ²)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasihah	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
	Jumlah	75	933	504,47

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

Berdasarkan Table 2.5 diketahui bahwa Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 kec, 75 desa dan 933 jumlah dusun dengan luas sekitar 504,47 km². Kecamatan di kabupaten bantul yang memiliki jumlah Desa terbanyak terdapat pada Kecamatan Banguntapan dan Imogiri yaitu dengan jumlah 8 Desa sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah Desa yang paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan yaitu dengan jumlah 2 Desa saja. Adapun Kecamatan di Kabupaten Bantul yang memiliki jumlah Dusun terbanyak terdapat pada Kecamatan Imogiri yaitu dengan jumlah 72 Dusun sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah

Dusun yang paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan yaitu dengan jumlah 43 Dusun.

B. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta

1. Dasar Pembentukan

Pemerintah, menyadari bahwa masalah pengangguran/ Ketenagakerjaan adalah masalah serius yang dihadapi dan harus diselesaikan dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak swasta dan element masyarakat lain yang sangat peduli dengan pengangguran; sehingga secara bertahap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mengatasi masalah pengangguran atau dengan kata lain menekan pengangguran semaksimal mungkin.³

Dalam bidang ketenaga ketenagakerjaan, masalah/tantangan yang di hadapi Kabupaten Bantul adalah:

- a. Jumlah pengangguran cukup tinggi
- b. Masih rmdahnya kualitas Tenaga Kerja/ Angkatan Kerja
- c. Belum terlindunginya hak dan perlindungan Tenaga Kerja.
- d. Adanya Sumber daya alam yang belum tergarap.

Sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 ayat (2) Bahwa tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

³ Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (tentang rencana strategis satuan kerja perangkat daerah tenaga kerja dan trasmigrasi Kabupaten Bantul. (hal. 1-2)

kemanusiaan, maka pemerintah bertanggung jawab mengupayakan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat.

Menyingkapi persoalan tersebut dan sesuai dengan amanat UUD 1945 ayat (2) diatas perlu dilakukan langkah-langkah melalui program Kegiatan Komprehensif yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penempatan Tenaga Kerja serta usaha dalam dalam rangka menciptakan atau mewujudkan Hubungan Industri yang kondusif dan manusiawi serta optimalisasi ketransmigrasian sehingga dapat di capai kemandirian dalam kesejahteraan masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berada dilingkup Pemerintah Daerah, sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya mengsucceskan kebijakan dan langkah-langkah strategis dan melalui programprogram kedalam Rencana Kerja Tahun 2006-2010

2. Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi

- a. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah **“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Trasmigrasi yang Berkualitas dan sejahtera”**.
- b. Misi Dinas Nakerstrans sebagai berikut:
 - 1) Mendorong Perluasan dan kesempatan kerja serta meningkatkan penempatan tenaga kerja.
 - 2) Meningkatkan dan mengembangkan system informasi ketenaga kerjaan ketrasmigrasian melalui Bursa kerja.

- 3) Mewujudkan hubungan industril yang selaras, serasi dan seimbang.
- 4) Mewujudkan mobilitas penduduk yang terarah, memfasilitasi pemindahan dan meningkatkan keterampilan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
- 5) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui penegakan hukuman ketenaga kerjaan.
- 6) Meningkatkan pelayanan rumah tangga dinas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.

Untuk mencapai misi yang ditetapkan Dinakertrans bepedoman pada asas kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Trasparansi
- 2) Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel)
- 3) Demokratis
- 4) Pelayanan Prima
- 5) Efektivitas dan efisien
- 6) Partisipasi

c. Tujuan

1) Tujuan : Tujuan rencana strategis Tahun 2006-2010 yang merupakan implementasi misi sebagai berikut :

- a) Penyediaan tenaga kerja dan transmigrasi yang berkualitas.
- b) Menciptakan peluang kesempatan kerja informasi pasar kerja dan mengoptimalkan penempatan tenaga kerja.
- c) Keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui penyebaran penduduk untuk meningkatkan masyarakat di kawasan transmigrasi.
- d) Melindungi kewajiban dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- e) Terwujudnya perlindungan norma kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja.

2) Sasaran: dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas ditetapkan rumusan sasaran pada tahun 2006-2010 sebagai berikut:

- a) Terciptanya tenaga kerja terampil sesuai dengan pasar kerja dan mampu berwirausaha.
- b) Terciptanya hubungan kerja yang kondusif.
- c) Meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat transmigran dan optimalisasi pelayanan perpindahan.

- d) Terciptanya kesadaran dalam menciptakan kesehatan dan keselamatan serta tegaknya norma-norma kerja.
- e) Peningkatan pelayanan.

d. Kebijakan dan Strategi

Untuk melaksanakan misi organisasi agar dapat berhasil dengan baik dipergunakan analisis SWOT sebagai berikut:

1) *Strenght* (kekuatan).

- a) Pembentukan Struktur dan Organisasi Disnakertrans.
- b) Tersedianya calon tenaga kerja dan Calon Transmigrans.
- c) Adanya perangkat / peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- d) Adanya BKK, LPPS, PJTKI / Cabang dan Lembaga Pelatihan, jumlah SDM Disnakertrans yang memadai.
- e) Adanya hubungan kerja yang selaras serasi dan seimbang.
- f) Komitmen Pemda tentang Pengentasan Kemiskinan.

2) *Weakness* (kelemahan).

- a) Kurangnya kualitas aparatur khususnya secara teknis.
- b) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta terbatasnya dana/anggaran yang tersedia.
- c) Kualitas tenaga kerja dan calon transmigran belum memadai.
- d) Kurangnya biaya sebagian pencari kerja untuk bekerja di Luar Negeri.

- e) Masih adanya sebagian perusahaan belum melaksanakan dan mentaati Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
 - f) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mendukung Undang-undang Ketenagakerjaan.
- 3) *Opportunity* (peluang)
- a) Pertumbuhan industri/perusahaan di Kabupaten Bantul semakin berkembang.
 - b) Adanya home disektor industri kerajinan dan makanan.
 - c) Kesempatan kerja di luar daerah dan di luar negeri masih terbuka.
 - d) Terbukanya Kabupaten dan Propinsi di Luar Jawa untuk Program Transmigrasi.
 - e) Terciptanya hubungan industrial kondusif
- 4) *Treatment* (ancaman)
- a) Perkembangan IPTEK yang sangat cepat.
 - b) Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul yang cukup tinggi.
 - c) Besarnya arus urbanisasi telah menimbulkan problema baru dalam penyelenggaraan transmigrasi.
 - d) Pertumbuhan ekonomi yang masih relatif kecil.

Strategi : Berdasarkan percematan dan analisa di atas maka strategi yang ditempuh dalam kurun waktu 5 tahun ke depan 2006-2010 yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta penciptaan kesempatan dan perluasan kerja.
- 3) Memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan pasar kerja.
- 4) Meningkatkan hubungan industrial yang kondusif (selaras, serasi, seimbang). Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi Lembaga yang terkait di daerah maupun pusat.
- 5) Meningkatkan kerja sama antar daerah (daerah asal daerah

3. Dasar Hukum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 46 tahun 2000 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Lampiran Daerah Seri D Nomor 33 Kabupaten

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

- a. Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
- b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul per Bagian / Subdin.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 1 bagian Tata Usaha dan 5 Sub. Dinas serta 1 UPTD.

1. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani administrasi kepada seluruh Unit Kerja, mengelola keuangan, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan administrasi kepada semua unit kerja.
- b. Penyusunan rencana, program dan laporan.
- c. Pengelolaan keuangan
- d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

2. Sub Dinas penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja.

Mempunyai tugas menyusun rencana kebijakan ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitasi Perijinan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, (PPTKIS) atau cabang, Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPSI), RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, mengumpulkan data ketenagakerjaan, melaksanakan dan pemberian ijin BKK dan memperpanjang ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS, UPS dan BKK, Tenaga Kerja Asing serta memfasilitasi penempatan tenaga kerja.

Mengawasi penempatan dan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan luar Negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja dan permintaan dan perluasan kerja.
- b. Pendaftaran pekerja pencari kerja, pendaftaran pencarian lowongan pekerjaan dan permintaan tenaga kerja.
- c. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

- d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi perijinan PPTKIS cabang PPTKIS dan LPPS.
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi pengawasan tempat serta pemberangkatan tenaga kerja Indonesia.
- f. Pelaksanaan upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja melalui penugasan Belajar Usaha Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT), Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK), serta perluasan kerja melalui pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), WUB dan Gramen Bank.
- g. Pemberian rekomendasi Perpanjangan Kerja dan pembinaan bagi tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu/Rekomendasi IKTA dan RPTKA, ijin tinggal (TA 02)
- h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap lembaga bursa tenaga kerja khusus.
- i. Pengumpul data angkatan kerja, penganggur dan setengah penganggur.
- j. Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah dinyatakan lulus seleksi.
- k. Persetujuan pendirian LPPS, PPTKIS/Cabang, persetujuan rekrut, Persetujuan penempatan dan persetujuan pemberangkatan.

3. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Kerja

Mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan kebijakan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi pengawasan, pemberian perijinan, melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan produktifitas kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sub Dinas Pelatihan dan produktifitas kerja mempunyai fungsi :

- a. Pemberian ijin dan pengawasan Lembaga Pelatihan Swasta dan perusahaan.
- b. Melaksanakan uji keterampilan.
- c. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan, Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan dan pemerintah, untuk mengetahui keberhasilannya.
- d. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas kerja sektor informal, usaha kecil menengah.
- e. Pemenian perijinan terhadap Lembaga Pelatihan Swasta, Perusahaan dan Asing.
- f. Pelaksanaan operasional mekanisme program pemagangan ke luar negeri.
- g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikat tenaga kerja.
- h. Penyiapan standarisasi pelatihan test kualifikasi tenaga kerja.

- i. Pengoordinasian pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK Bantul, Institusional maupun Mobile Training Unit (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta.
 - j. Peraturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan pelatihan.
4. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

Mempunyai tugas memfasilitasi hubungan kerja antara Organisasi pekerja dengan pengusaha, memfasilitasi dan membantu penyelesaian perselisihan hubungan industri/pemutusan hubungan kerja melaksanakan peningkatan tugas dan peran lembaga kerjasama biparti dan tripartite, memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan syarat-syarat kerja dan peningkatan fungsi tripartite kesejahteraan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitasi sarana hubungan industrial.
- b. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja.
- c. Pelaksanaan fasilitasi organisasi pekerja dan pengusaha.
- d. Pelaksanaan, fasilitasi lembaga kerjasama biparti dan peningkatan fungsi/peran lembaga tripartite.
- e. Pelaksanan fasilitasi monitoring syarat-syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

- f. Pelaksanaan fasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja.
- g. Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengupahan.
- h. Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja sektor informal.
- i. Pelaksanaan syarat-syarat kerja tani nelayan.
- j. Fasilitasi terbentuknya Koperasi Karyawan dan KB Perusahaan.

5. Sub Dinas Transmigrasi

Mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi yang meliputi Transmigrasi Umum, Swakarsa Berbantuan dan Swakarsa Mandiri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pengarah dan penempatan transmigrasi sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Penyampaian informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan legitimasi calon transmigran.
- d. Pendidikan dan pelatihan calon transmigran.
- e. Pelayanan penampungan calon transmigran.

- f. Pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan sementara.
- g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan daerah tujuan transmigran.

6. Sub Dinas Pengawasan

Mempunyai tugas merumuskan rencana dan melaksanakan kebijakan operasional pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan operasional dan Law Inforcement terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan sesuai kewenangan Kabupaten.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, peneliti, pengkajian dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur.
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dan ijin kerja malam wanita.
- d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta perusahaan kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P23K), rekomendasi poliklinik dan jasa boga diperusahaan, penerbitan rekomendasi pestisia, penerbitan/menunjukkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)

Penerbitan keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Kimia,
Penunjukan Petugas K3 Bidang Kimia Instalasi Listrik.

- e. Pengesahan instalasi listrik, Pengesahaan instalasi penyalur petir, pengesahaan instalasi proteksi kebakaran, perijinan pesawat lif listrik.
- f. Pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan bejana tekan, botol baja, perijinan pemakaian pesawat angkat dan angkut, pengesahan pemakaian pesawat diesel pembangkit listrik, Pelayanan bidang hyperkas dan K3, pemeriksaan dan pelatihan hyperkas.
- g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggara transmigrasi.

7. UPTD BLK

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan teknis meliputi teknis latihan kerja dan teknis pemasaran serta melaksanakan urusan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

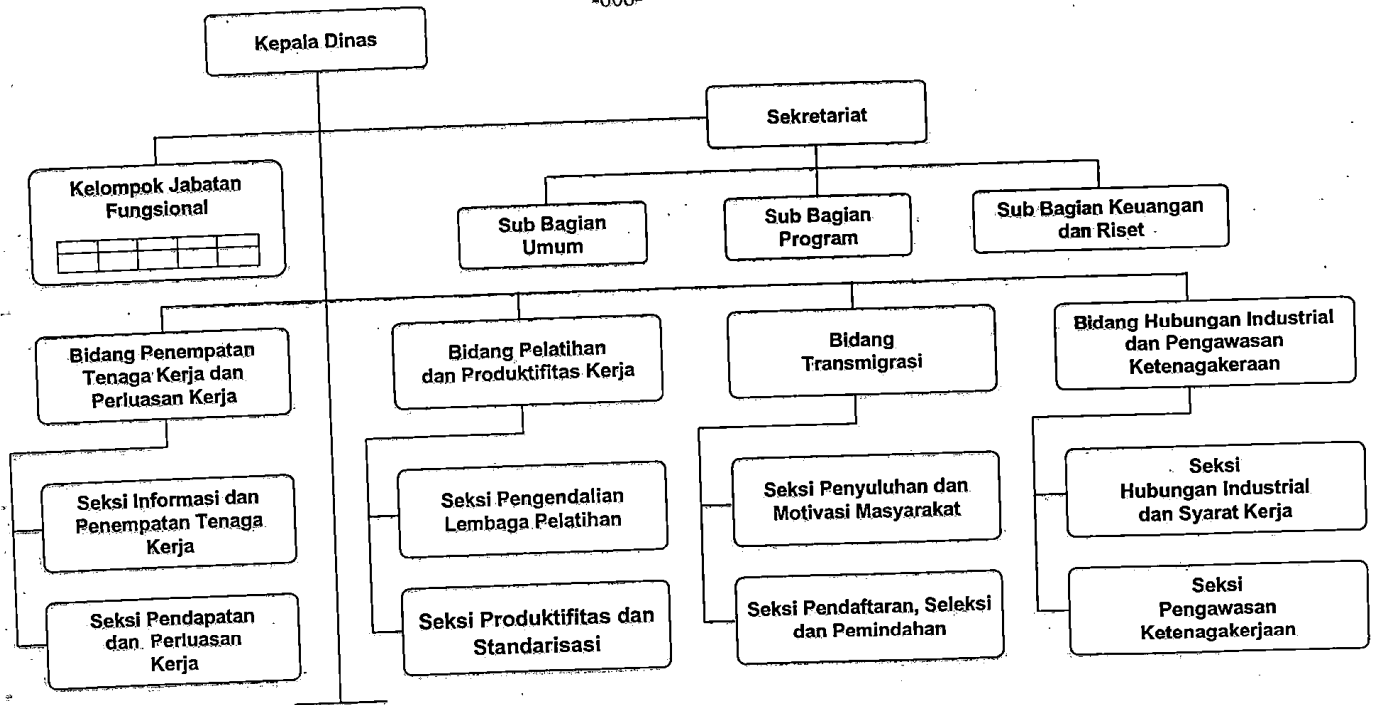
UPTD-BLK mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan latihan kerja.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran.
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi lapangan kerja dan atau pasar kerja.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

5. Bagan Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

(Bagan Susunan Organisasi)

-o0o-



Keterangan:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Penempatan dan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Seksi informasi dan penempatan tenaga kerja
 - b. Seksi pendataan dan perluasan kerja
4. Bidang pelatihan dan produktifitas kerja terdiri dari:
 - a. Seksi pengendalian lembaga pelatihan
 - b. Seksi produktifitas dan standarisasi
5. Bidang Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Seksi Hubungan Industrial
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Bidang transmigrasi terdiri dari:
 - a. Seksi penyuluhan dan motivasi masyarakat
 - b. Seksi pendaftaran, seleksi dan pemindahan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BK) terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Data TKI Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Negara Tujuan

Pada masa ini, walaupun migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terus meningkat dan lebih bersifat sukarela tetapi jelas pekerjaan kasar masih paling dominan mereka masuki. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan faktor utama yang menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak dapat masuk pada sektor yang lebih tinggi, tidak dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Asing lainnya. (Seperti India, Pakistan, Thailand, dan Filipina). Hal tersebut ditambah kurangnya usaha pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan pekerja Indonesia di luar negeri.

Bahkan kalau kita telusuri dari berbagai kasus yang pernah melanda pekerja Indonesia tersebut baik semasa masih di Indonesia, dalam perjalanan, maupun di Negara tujuan tidak jarang menjadi "Sapi Perahan" yang melibatkan orang-orang yang semestinya melindungi dan bertanggung jawab terhadap mereka (Spann 1993: Nasution 1997).

Dengan demikian diperlukan usaha nyata pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang siap bersaing di pasaran tenaga kerja manca negara. Oleh karena itu sudah saatnya tenaga kerja kita harus ditingkatkan kualitasnya, dengan harapan bisa bekerja di sektor yang layak, hal tersebut diupayakan dengan mengadakan berbagai macam pelatihan, penyuluhan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia yang lebih

berkualitas yang berkerja diluar negeri, supaya tenaga kerja kita tidak dilecehkan dan dipandang sebelah mata di Negara tempat mereka berkerja. Karena selama ini negara tujuan tenaga kerja kita tidak menganggap tenaga kerja kita berkualitas dan berkompeten. Sehingga mereka digaji dengan sangat minim dan tidak jarang mereka tidak digaji dan disiksa ditempat mereka bekerja. Dengan adanya berbagai macam program dan kegiatan pelatihan, penyuluhan tersebut, tenaga kerja kita diharapkan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

Tabel 2.7
Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/orang
1.	Laki-laki	197
2.	Perempuan	239
	Jumlah	436

Sumber: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2010

Berdasarkan tabel daftar jenis kelamin Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bantul, dapat penulis jelaskan bahwa sebagian besar tenaga kerjanya adalah wanita hal itu dapat dilihat pada tabel di atas, dimana jumlah tenaga kerja Indonesia yang wanitanya adalah sebanyak 239 sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia yang laki-lakinya sebanyak 197 hal ini menguatkan banyak pihak yang mengatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagian besar adalah wanita dibandingkan laki-laki hal ini disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia

Tabel 2.8
Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah/Orang
1.	SD	1
2.	SMP	45
3.	MTS	3
4.	SMA	65
5.	SMK	167
6.	SMU	10
7.	D 1	2
8.	D3	2
Jumlah		295

Sumber : Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis jelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten Bantul masih rendah, hal tersebut bisa dilihat dari tingkat pendidikan mereka yang sebagian besar hanya berpendidikan SMA dan yang sederajat hal ini mengakibatkan mereka dianggap tenaga kerja kasar karena selama ini tahu bahwa hampir 90% Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri bekerja menjadi Pekerja Rumah Tangga dan sisanya lagi menjadi buruh, hanya beberapa saja yang bekerja menjadi tenaga kerja unggulan. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 sebanyak 295 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dari SD 1 orang, SMP 45, MTS 3 orang, SMA 65 orang, SMK 167 orang, SMU 10 orang, D1 2 orang dan D3 2 orang.

Tabel 2.9
Negara Tujuan

No.	Negara Tujuan	Jumlah/Orang
1.	Malaysia	94
2.	Malaysia Barat	135
3.	Malaysia Timur	18
4.	Amerika	23
5.	Taiwan	1
	Jumlah	271

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia mempunyai beberapa alternatif Negara tujuan mereka bekerja dan kebanyakan tujuan mereka adalah ke Malaysia, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, karena sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ke Malaysia adalah bekerja menjadi buruh dan pekerja rumah tangga jarang sekali menemui Tenaga Kerja Indonesia bekerja di sektor yang vital, beberapa Negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 adalah Malaysia sebanyak 94 orang, Malaysia Barat 135 orang,

Tabel 2.10
Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2010

No	Pendidikan	Jumlah orang	Jumlah	
			L	P
1.	SD	2	69	27
2	SMP	5		
3	SMA	13		
4	SMK	30		
5	S1	37		
6	S2	7		
7	Paket C	2		
	JUMLAH	96	69	127

Dari jumlah komposisi pegawai yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sudah mencukupi standar, di mana jumlah seluruh pegawai yang bekerja sebanyak 96 orang, yang berlatar belakang dari berbagai pendidikan dan jabatan yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan banyaknya pegawai yang dimiliki oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul ini diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Kabupaten Bantul. Berikut dapat dilihat komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.